

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN
PENGAWASAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DIKLAT *DATA ANALYTICS BATCH II*

Disusun oleh:

FAJAR RIZKI SAPLINARUSPIA SARAGIH

NIP 199010182012101001

**DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG
POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KEBUDAYAAN**

LATAR BELAKANG

Pendidikan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak setiap warga negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Konstitusi negara Republik Indonesia menghendaki setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak, yang selanjutnya dimaknai dengan kewajiban negara untuk memberikan pemerataan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan pemerataan aksesibilitas dan mutu pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat pentingnya dana BOS Reguler dalam rangka pemerataan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan serta besarnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, maka diperlukan suatu upaya pengawasan terpadu atas ketercapaian tujuan program dan akuntabilitas atas pengelolaan dana BOS Reguler.

BAB I

DATA UMUM PENGAWASAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

A. Gambaran Umum Pengawasan

Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dalam bentuk evaluasi atas pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2021 serta penetapan penerima dana di tahun 2022. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 48 ayat 2 menyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Tujuan evaluasi atas dana BOS Reguler Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa penetapan penerima dana BOS Reguler Tahun 2022 telah sesuai dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
2. Memastikan bahwa penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2022 telah sesuai dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
3. Memastikan pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2021 telah sesuai dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan; dan
4. Memberikan gambaran kebermanfaatannya dana BOS Reguler Tahun 2021 dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan adalah Program Bantuan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan merupakan program yang bersumber dari penggunaan anggaran DAK non-fisik.

C. Matriks Desain Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah

Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah dilakukan untuk menguji beberapa hipotesa, yaitu:

1. Ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022
 - a. Satuan pendidikan penerima dana tidak sesuai dengan kriteria penerima;
 - b. Peserta didik penerima dana tidak sesuai dengan kriteria penerima; dan
 - c. Sisa dana BOS Reguler tahun sebelumnya belum diperhitungkan dengan optimal dalam penyaluran dana periode berikutnya.
2. Kelancaran penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022
Dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022 disalurkan tidak tepat waktu.
3. Ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021
 - a. Ketepatan penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021
 - 1) Penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2021 tidak optimal (sisa dana);
 - 2) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Satuan pendidikan yang menggunakan dana BOS Reguler Tahun 2021 tidak sesuai dengan kebutuhan dan komponen penggunaan pada petunjuk teknis;
 - 3) Realisasi penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2021 tidak sesuai dengan RKAS dan petunjuk teknis;
 - 4) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS sekolah melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan petunjuk teknis; dan
 - 5) Satuan pendidikan belum memanfaatkan item-item belanja yang menggunakan dana BOS Reguler Tahun 2021.
 - b. Akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021
 - 1) Volume pekerjaan pada dokumen bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - 2) Kegiatan/belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (fiktif); dan

- 3) Indikasi kemahalan harga atas kegiatan/belanja yang menggunakan dana BOS Reguler Tahun 2021.
4. Gambaran kebermanfaatan dana BOS Reguler Tahun 2021 dalam mencukupi kebutuhan operasional sekolah.

Dana Pendidikan pada satuan pendidikan belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan aksesibilitas pendidikan (gambaran capaian indikator layanan dasar dan porsi anggaran pendidikan pada satuan pendidikan).

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

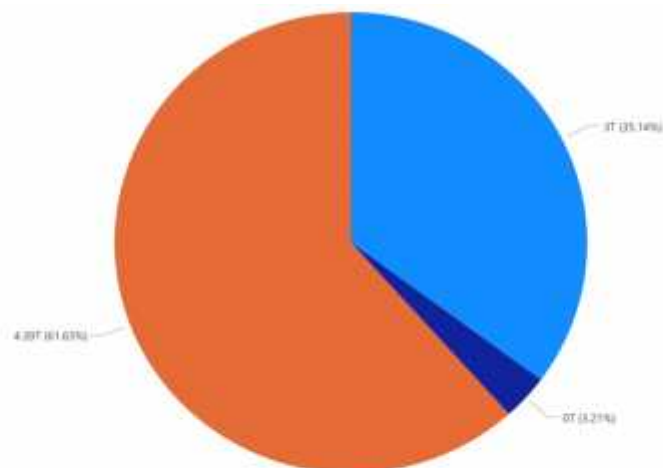
Analisis Data dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Power BI. Langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengekspor dataset hasil pengawasan BOS ke dalam data excel;
2. Dataset tersebut kemudian dilakukan *cleansing* untuk menghapus kolom dan baris yang tidak diperlukan;
3. Dataset yang sudah dilakukan *cleansing* kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan:
 - a. Gambaran hasil pengawasan atas ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022; dan
 - b. Gambaran hasil pengawasan atas ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021.
4. Visualisasi hasil analisis data;
5. Interpretasi hasil analisis data.

B. Uraian Analisis Data dan Hasil

Hasil analisis data adalah sebagai berikut

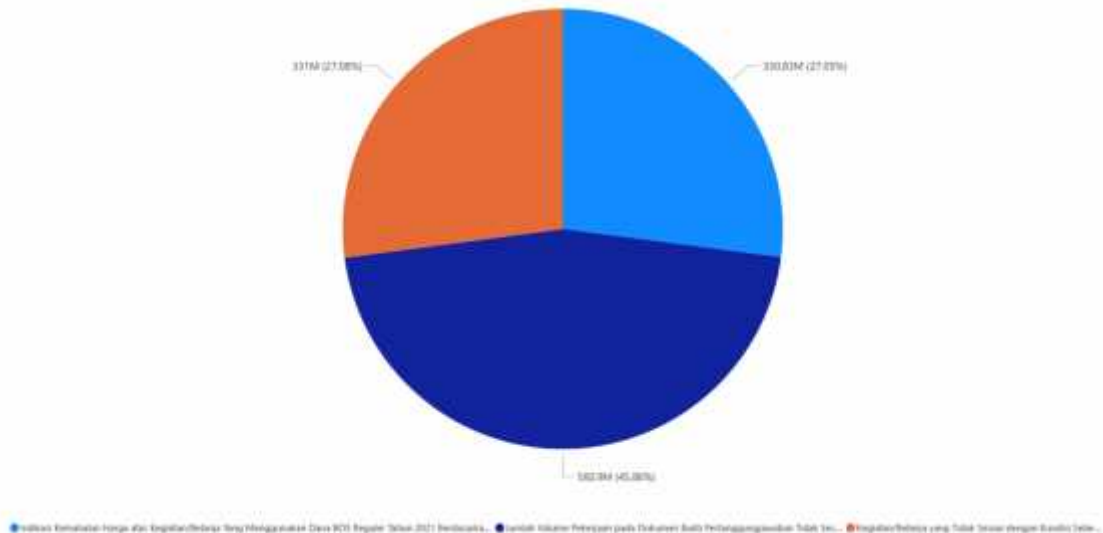
1. Gambaran hasil pengawasan atas ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022



Hasil pengawasan atas ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022 menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat sisa dana BOS Reguler Tahun 2021 sebesar Rp4.390.305.675.622,20 yang menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan pada Penyaluran Tahap II TA 2022;
- Ketidakakuratan realisasi dana dengan nilai sebesar Rp2.502.695.810.966,00;
- Terdapat Satuan Pendidikan yang tidak memiliki izin yang terdaftar pada Dapodik namun menerima BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp228.415.350.000,00.

2. Gambaran hasil pengawasan atas ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021



Hasil pengawasan atas ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021 menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat volume pekerjaan pada dokumen bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai Rp560.901.774,05;
- Terdapat kegiatan/belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (fiktif) dengan nilai Rp331.216.400,00;
- Terdapat indikasi kemahalan harga atas kegiatan/belanja yang menggunakan dana BOS Reguler Tahun 2021 dengan nilai Rp 330.825.324,00.

BAB III

PENUTUP

Interpretasi Hasil Analisis Deskriptif, yang bertujuan menjawab pertanyaan pengawasan, adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengawasan atas ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan masih ada permasalahan dengan total nilai sebesar Rp7.121.416.836.588,20, namun belum dapat disimpulkan mengenai ketepatan alokasi dana BOS Reguler Tahun 2021 dan 2022.
2. Hasil pengawasan atas ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Reguler Tahun 2021 menunjukkan masih ada permasalahan dengan total nilai sebesar Rp1.222.943.498,05, namun belum dapat disimpulkan mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran BOS Tahun 2021.

Disclaimer:

Analisis data dan indikator-indikator yang digunakan di atas hanya bersifat simulasi untuk kebutuhan penyaji dalam penyelesaian tugas diklat *data analytics*.